

Pengaruh Persepsi Konstruksi Sosial Kawasan Asia Timur Terhadap Kebijakan Nuklir Korea Utara: Analisis Terhadap Perubahan Sikap Korea Utara Menuju Deklarasi Panmunjom

Arda Vicky Satria

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Email: ardavickyir@gmail.com

Rizky Herdiyanti Puspita

Concord Review

Email: rizkyherdianthi@gmail.com

Michael J. Kristiono

Peneliti Independen

Email: mj.kristiono@gmail.com

Abstrak

Teka-teki stabilitas dan keamanan Asia Timur sebagian besar ditimbulkan oleh keengganan Korea Utara untuk membongkar persenjataan nuklirnya walaupun telah mendapat tekanan dunia internasional. Meski demikian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sikap Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un mulai melunak, terbukti dengan ditandatanganinya Deklarasi Panmunjom pada tanggal 27 April 2018. Dengan menggunakan kerangka kerja analisis *Regional Security Complex Theory* (RSCT) sebagaimana dituliskan oleh Buzan dan Wæver (2003), artikel ini berargumentasi bahwa perubahan kebijakan tersebut merupakan bagian dari respon Korea Utara terhadap dinamika keamanan kawasan Asia Timur. Tulisan ini menganalisis empat variabel esensial di *security complex* Asia Timur, yaitu batas geografis, struktur anarki, polaritas, dan konstruksi sosial. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan persepsi Korea Utara terhadap pola *amity-enmity*, yakni konstruksi sosial di kawasan. Dengan perubahan persepsi tersebut, Korea Utara menemukan adanya penurunan ancaman dari kawasan Asia Timur terhadap kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, Korea Utara memandang baik untuk mengikuti tuntutan denuklirisasi dengan tujuan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di mata komunitas internasional.

Kata Kunci: *denuklirisasi, Asia Timur, Regional Security Complex, Korea Utara*

Abstract

The East Asian stability and security conundrum is partially caused by the unwillingness of North Korea to dismantle its nuclear armaments despite international pressure. However, recent development shows that North Korean Supreme Leader Kim Jong Un has adopted a milder stance as he signed Panmunjom Declaration on 27 April 2018. Using Regional Security Complex Theory (RSCT) prescribed by Buzan and Wæver (2003) as the framework of analysis, this paper argues that the unprecedented change of policy is a part of North Korean response towards the dynamics of regional security in East Asia. In this paper, the four essential variables of East Asia security complex are being analyzed, namely geographical boundary, anarchic structure, polarity and social construction. It is found that there has been a change in North Korea's perception of the amity-enmity pattern, that is, the social construction of the region. With the switch of perception, North Korea views that there is a lower level of threat posed by the region towards its national interests. As

such, North Korea finds that it is beneficial to comply with denuclearization demands in order to gain a better standing with the international community.

Keywords: denuclearization, East Asia, Regional Security Complex, North Korea

PENDAHULUAN

Tulisan ini menganalisis perubahan sikap Korea Utara mengenai kebijakan pengembangan nuklirnya. Selama lebih dari 50 tahun terakhir, Korea Utara terus mengembangkan nuklirnya meskipun mendapat tekanan dari negara-negara lain, termasuk dari sekutu terbesarnya yaitu Cina. Namun, situasi ini berubah saat Korea Utara menyetujui Deklarasi Panmunjom pada 27 April 2018, yang salah satunya berisi mengenai komitmen untuk melakukan denuklirisasi secara total. Bagian awal artikel ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi nuklir dan peran senjata nuklir bagi Korea Utara. Selanjutnya, dengan menggunakan kerangka kerja analisis *Regional Security Complex*, artikel ini menjelaskan tentang situasi terkini kawasan Asia Timur serta bagaimana hal tersebut mengubah kebijakan nuklir Korea Utara, yang ditunjukkan melalui komitmen untuk melakukan denuklirisasi.

Teknologi nuklir banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah turut mempengaruhi perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir. Semenjak penggunaan senjata nuklir oleh Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia Kedua, pengembangan teknologi nuklir dunia condong ke arah pembuatan senjata perang. Bermula dari fenomena inilah maka istilah 'nuklir' seringkali dikaitkan dalam konteks persenjataan (Akhadi, 1997, hlm. 10).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan berbagai perjanjian mengenai pelarangan uji coba nuklir di antaranya *Partial Nuclear-Test-Ban Treaty* (PTBT) tahun 1963 yang melarang uji coba nuklir di

udara, luar angkasa, dan laut (United Nations, 1963). Selain itu terdapat juga perjanjian *Threshold Test-Ban Treaty* (TTBT) tahun 1976 yang melarang uji coba nuklir di atas kapasitas 150 kiloton, dan *Peaceful Nuclear Explosions Treaty* pada tahun yang sama berisi larangan uji coba nuklir untuk tujuan militer (United Nations, 1996).

Semenjak pengembangan nuklir pada tahun 1953 dan uji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya pada tahun 2003, Korea Utara terus melakukan pengembangan senjata nuklirnya. Korea Utara mengacuhkan berbagai bentuk tekanan internasional termasuk dari Cina yang merupakan sekutu terdekatnya.

Namun demikian, pada 27 April 2018, Korea Utara mengubah sikapnya pada pertemuan bersejarah antara Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In. Pertemuan yang berlangsung di zona demiliterisasi (*demilitarized zone / DMZ*) tersebut menghasilkan Deklarasi Panmunjom. Sebagaimana tertuang pada pasal 3 ayat 4 dokumen tersebut, kedua negara bersepakat mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir melalui upaya "*complete denuclearization*" (Reuters, 2018). Dalam pertemuan tersebut, Kim secara eksplisit menyatakan bahwa Korea Utara akan melakukan denuklirisasi (Fifield, 2018).

Perubahan sikap Korea Utara tersebut mendapat respon beragam dari dunia internasional. Banyak harapan positif yang memprediksi bahwa pembahasan 'rezim perdamaian' kawasan dalam pertemuan tersebut akan benar-benar terwujud.

Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Panmunjom, pada 12 Mei 2018 Korea Utara mengumumkan rencana pembongkaran situs nuklirnya di kawasan Pegunungan Punggye-ri. (Shin, 2018). Tanggal 19 Mei 2018, gambar satelit yang diambil oleh *Beyond Parallel* (Gambar 1) memperlihatkan persiapan Korea Utara untuk menonaktifkan situs nuklir Korea Utara di Punggye-ri dimana sebagian fasilitas telah ditutup (Cha dan Collins, 2018).

Gambar 1



Sumber: CSIS/Beyond Parallel (2018)

Pada 24 Mei 2018, jurnalis dari Korea Selatan melaporkan peledakan tiga terowongan, fasilitas observasi uji coba nuklir dan barak tempat tinggal personil lapangan dan pusat pengolahan logam untuk senjata nuklir di Punggye-ri. Momen peledakan turut disaksikan oleh sekelompok jurnalis dari Britania Raya, Cina, Rusia, Korea Selatan dan Amerika Serikat (Choe, 2018). Peledakan ini dilihat sebagai langkah konkret Kim dalam merealisasikan komitmen denuklirisasinya, sebelum pertemuan puncaknya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dijadwalkan pada 12 Juni di Singapura (BBC News, 2018).

Sejarah Pengembangan Nuklir Korea Utara

Korea Utara mulai melakukan pengembangan nuklir setelah berakhirnya

Perang Korea.¹ Buntunya penyelesaian Perang Korea dan krisis yang berlarut-larut memunculkan kembali wacana penggunaan senjata nuklir oleh Amerika Serikat. Dipengaruhi oleh wacana penggunaan senjata nuklir tersebut, pada tahun 1953 Korea Utara dan Korea Selatan akhirnya setuju untuk melakukan gencatan senjata. Meskipun berhasil mengakhiri Perang Korea, gencatan senjata tersebut tidak mengakhiri Perang Korea. Ancaman senjata nuklir yang berkali-kali dilakukan oleh AS dalam Perang Korea inilah yang mendasari Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir (Perry, 2006, hlm. 607). Peningkatan signifikan pada perekonomian Korea Selatan serta bantuan militer oleh Amerika Serikat pasca Perang Korea membuat pemimpin Korea Utara, Kim Il-Sung, semakin merasa terancam, sehingga Kim terus berusaha memperbesar kekuatannya dengan senjata nuklir (Hagstrom dan Soderberg, 2006, hlm. 36).

Korea Utara mulai melakukan pengembangan senjata nuklir pada tahun 1956 di bawah perjanjian dengan Uni Soviet dalam kerjasama penggunaan damai energi nuklir. Dalam perjanjian ini, Korea Utara mulai mengirim ilmuwan dan teknisi ke Uni Soviet untuk program pelatihan Moskow yang bertujuan untuk melatih para ilmuwan dari negara komunis lain (Heo dan Woo, 2008, hlm. 490). Kim Il Sung, pemimpin Korea Utara saat itu mengambil kebijakan untuk mengembangkan kapabilitas rudal balistik, dimulai pada tahun 1965 melalui

¹ Perang Korea (*Korean War*), lazim disebut juga sebagai *Fatherland Liberation War*, berlangsung Juni 1950 – Juli 1953. Perang ini diawali ketika Korea Utara melakukan invasi ke Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Secara *de jure*, saat ini Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam kondisi perang mengingat belum adanya perjanjian damai di antara kedua negara. Meski demikian, secara *de facto* Perang Korea berakhir dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953.

berdirinya Akademi Militer Hamhung, pusat pelatihan tentara Korea Utara untuk pengembangan rudal (Bermudez, 1999, hlm. 2).

Uni Soviet pada 1965 juga mulai menyediakan bantuan secara menyeluruh kepada Korea Utara dalam membangun pusat penelitian di Yongbyon. Fasilitas nuklir yang dikembangkan pertama kali oleh Korea Utara ini adalah reaktor nuklir model Uni Soviet yang dioperasikan untuk tujuan penelitian di Yongbyon, Korea Utara. Pada tahun 1994, Korea Utara sempat menghentikan pengembangan nuklirnya, ketika Korea Utara dan Amerika Serikat sepakat menandatangani *Agreed Framework*. Perjanjian tersebut berisi janji Korea Utara untuk menghentikan dan membongkar reaktor nuklirnya dan ditukar dengan bantuan internasional yaitu membangun dua reaktor nuklir ringan untuk Korea Utara (CNN, 2018).

Meski demikian, Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya pada Oktober 2006 di situs Punggye-ri (CNN, 2017). Korean Central News Agency (KCNA) mengabarkan bahwa uji coba tersebut dianggap sebagai sebuah lompatan besar dalam pembangunan negara sosialis yang kuat dan makmur. Namun, keberhasilan uji coba nuklir tersebut, dianggap tidak memuaskan bagi Korea Utara karena kekuatan nuklir tersebut masih kurang dari 1 kiloton (Office of the Director of National Intelligence, 2006), cukup jauh dari kekuatan 4 kiloton yang diharapkan (Hecker, 2006; Hecker, 2008). Selain itu, bom nuklir yang dibangun saat itu masih belum bisa dirakit sebagai hulu ledak Taepodong².

² Taepodong (대포동) merupakan nama rudal balistik yang dikembangkan oleh Korea Utara. Taepodong I mampu membawa hulu ledak nuklir yang daya jangkaunya mencapai 1.500 kilometer dan Taepodong II mencapai 4.000 kilometer.

Sejauh ini, Korea Utara telah berhasil melakukan 5 kali uji coba senjata nuklir. Uji coba nuklir pada September 2016 menjadi uji coba nuklir terkuat yang dimiliki Korea Utara yaitu dengan daya ledak 10 dan 30 kiloton (CNN, 2018). Agustus 2017 lalu, Defense Intelligence Agency mengemukakan Korea Utara akhirnya berhasil membuat hulu ledak nuklir yang dapat dimuat ke dalam rudal balistik dan dapat diluncurkan tergantung pada kemampuan jarak rudal balistiknya (Warrick dkk., 2017). Hal tersebut merupakan ancaman serius mengingat rudal balistik antar benua (ICBM) dapat dipandang sebagai fase terakhir dalam proyeksi kekuatan suatu negara, karena memungkinkan negara tersebut melancarkan serangan berat terhadap negara lain. Berdasarkan perspektif Korea Utara, ICBM memberikan penyangga strategis yakni sebagai pelindung sekaligus alat perlawanan dari ancaman eksternal (Lee, 2001, hlm. 88).

Pada 28 November 2017, Korea Utara mengumumkan kepada publik bahwa telah berhasil melakukan uji coba rudal ICBM, Hwasong-15, yang diklaim mampu membawa hulu ledak nuklir dan jangkauannya mencapai seluruh wilayah Amerika Serikat (Nytimes, 2017). Korea Utara mendeskripsikan rudal Hwasong-15 sebagai '*most powerful ICBM*'.

Gambar 2



Sumber: BBC News (2017a)

Regional Security Complex Theory

Analisis pada artikel ini menggunakan kerangka analisis keamanan regional untuk memahami perubahan kebijakan nuklir Korea Utara. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis Buzan dan Wæver karena teori *Regional Security Complex* (RSC) memberikan pandangan yang mendalam mengenai keamanan regional.

Teori RSC merupakan sebuah teori yang menganalisis dinamika keamanan dunia dengan menggunakan keamanan kawasan sebagai tingkat analisis utama. Sebagai bagian dari perspektif regionalis, teori tersebut memandang lokus konflik dan kerja sama pada tingkat kawasan sebagai poin yang sangat penting. Dengan demikian, pemahaman atas dinamika keamanan internasional dilakukan dengan cara mempertimbangkan dinamika keamanan pada tingkatan regional (Buzan dan Wæver, 2003, hlm. 10-11).

Menurut teori RSC, terdapat tiga kategori kekuatan dunia dengan memandang bagaimana kekuatan tersebut berpengaruh dalam wacana-wacana sekuritisasi dan desekuritisasi pada tingkatan regional dan global, yaitu sebagai *superpower*, *great power*, dan *regional power* (Buzan dan Wæver, 2003, hlm. 34-37). Aktor *superpower* memiliki pengaruh dan kapabilitas politik, ekonomi, dan militer yang sangat luas, baik pada tingkatan global maupun regional. Kekuatan *superpower* hadir di seluruh kawasan di dunia dalam setiap wacana sekuritisasi maupun desekuritisasi. Menurut Buzan dan Wæver, semenjak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara *superpower* di dunia (Buzan dan Wæver, 2003, hlm. 34-35).

Great power mempunyai kekuatan militer, politik, dan ekonomi yang dipandang berpotensi untuk menyaingi *superpower* di masa depan. Meskipun sebuah *great power* belum tentu dapat hadir di setiap kawasan, kapabilitas sebuah *great power*

dipertimbangkan secara serius di beberapa kawasan yang berbeda. Berdasarkan pandangan Buzan dan Wæver, terdapat empat *great power* dunia pada saat ini, yaitu poros Inggris/Prancis/Jerman di Uni Eropa, Jepang, Cina, dan Rusia (Buzan dan Wæver, 2003, hlm. 35-37).

Kategori ketiga kekuatan dunia menurut teori RSC adalah *regional power*. Untuk mencapai status ini, kekuatan sebuah entitas harus diperhitungkan dalam lingkup kawasan dimana entitas tersebut berada. Meski demikian, *regional power* dianggap penting pada tingkatan global hanya karena perannya dalam mendefinisikan polaritas kekuatan di sebuah kawasan. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini antara lain Israel di Timur Tengah, Brazil di Amerika Selatan, dan Indonesia di Asia Tenggara (Buzan dan Wæver, 2003, hlm. 34).

Dinamika keamanan regional tidak terlepas dari relasi kuasa di antara entitas-entitas *superpower*, *great power*, dan *regional power* dalam mewacanakan sekuritisasi dan desekuritisasi di sebuah RSC (Buzan dan Wæver, 2003, hlm. 37). Menurut Buzan dan Wæver (2003, hlm. 44), RSC adalah proses sekuritisasi maupun desekuritisasi yang dilakukan oleh aktor dalam regional yang tidak bisa terlepas dari persinggungan permasalahan keamanan satu dan yang lainnya.³ Teori RSC dapat dijadikan kerangka kerja untuk mengorganisasi studi empiris keamanan regional. Teori RSC mampu mengidentifikasi dan menganalisis perubahan di level regional. Menurut Buzan dan Wæver (2003, hlm. 41-42), struktur utama dari sebuah RSC terdiri dari empat variabel. Keempat variabel ini memiliki posisi yang sejajar, saling

³ Dalam bahasa aslinya, "a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another."

melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Variabel didalam RSC antara lain:

1. Kedekatan Geografis (*Boundary*): Batasan geografis menunjukkan hingga sejauh mana isu-isu keamanan dalam sebuah kawasan tersekritisasi bersama. Variabel ini juga menjadi faktor penentu dalam melihat transformasi eksternal sebuah kompleks keamanan.
2. Struktur Anarki (*Anarchic Structure*): terdiri dari dua atau lebih negara. Dalam variabel ini, tingkat anarkisme atau derajat otonomi aktor-aktor otonom dalam kompleks keamanan di sekitar Korea Utara akan dianalisis. Indikator utama untuk menganalisis hal ini adalah melihat signifikan atau tidaknya peranan institusi regional dalam menangani suatu isu keamanan tertentu
3. Polaritas (*Polarity*): Menjelaskan distribusi *power* dari negara-negara yang ada didalam kawasan.
4. Konstruksi Sosial (*Social Construction*): Variabel ini memperlihatkan bagaimana sebuah negara mempersepsikan negara lainnya, apakah sebagai teman (*amity*) atautkah sebagai musuh (*enmity*).

Mengingat keempat karakteristik di atas bersifat variabel, sebuah situasi dan kondisi pada sebuah RSC dapat berubah dari masa ke masa. Dalam perjalanannya, sebuah RSC dapat menghadapi tiga buah skenario (Buzan dan Wæver, 2003, hlm. 53), yaitu:

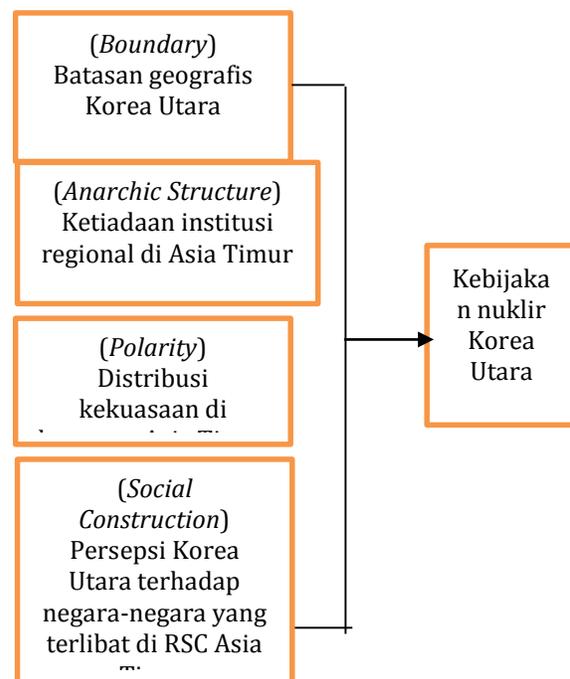
1. Pelanggaran status: tidak ada perubahan signifikan pada seluruh struktur esensial / karakteristik RSC
2. Transformasi internal: terjadi perubahan pada RSC namun perubahan tersebut masih berada dalam konteks perbatasan geografis

yang ada. Dengan kata lain, terjadi perubahan pada struktur esensial / karakteristik RSC nomor 2-4.

3. Transformasi eksternal: terjadi perubahan pada struktur esensial / karakteristik geografis RSC. Dengan kata lain, cakupan wilayah sebuah RSC meluas atau menciut.

Penggunaan teori RSC pada penelitian ini didasarkan kepada argumentasi utama penulisan ini, yaitu perubahan kebijakan Korea Utara tersebut tidak terlepas dari transformasi internal yang terjadi di RSC Asia Timur.

Gambar 3
Model Analisis



Sumber: disarikan oleh penulis

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi setiap variabel yang tersedia dalam kerangka pemikiran yang telah dipilih untuk

mendapatkan hasil secara deduktif-induktif (Neuman, 2003, hlm. 67). Sementara itu, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus tunggal (Bryman, 2004, hlm. 48). Dalam penelitian ini, alasan denuklirisasi Korea Utara menjadi variabel dependen sementara kebijakan senjata nuklir Korea Utara menjadi variabel independen. Variabel dependen dan independen tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dalam studi kasus yang dipilih.

Teknik pengumpulan data yang digunakan akan diperoleh dari data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari pernyataan resmi negarawan, transkrip pidato, wawancara ataupun laman resmi institusi yang terkait. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber yang diambil merupakan literatur-literatur yang berasal dari buku, artikel, jurnal, berita yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis eksplanatif kualitatif yaitu menggunakan suatu teori dengan unit analisisnya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Stabilitas Kawasan bagi Perkembangan Teknologi Nuklir Korea Utara

Tujuan politik luar negeri Korea Utara di kawasan pada dasarnya terbentuk berdasarkan kompetisi legitimasi yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik kedua negara di Semenanjung Korea ini kemudian membuat Korea Utara berambisi untuk mempertahankan statusnya sebagai negara revisionis yang ingin mengubah tatanan keamanan kawasan. Konsistensi Korea Utara dalam mendominasi *zero-sum competition* berhadapan dengan Korea Selatan di

kawasan telah menjadi tujuan strategis keamanan nasional semenjak tahun 1945 (Heo dan Woo, 2008, hlm. 6).

Kompetisi legitimasi antara kedua negara di Semenanjung Korea tersebut turut mengarahkan perspektif Korea Utara terhadap Korea Selatan. Korea Selatan dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap eksistensi (*existential threat*) Korea Utara karena ingin mengambil legitimasi Korea Utara sebagai sebuah Negara. Kedua negara Korea tersebut berpegang pada keyakinan masing-masing bahwa mereka memiliki legitimasi penuh untuk memerintah keseluruhan Semenanjung Korea. Semenjak instabilitas politik di antara kedua negara meningkat antara tahun 1960 hingga 1970, Korea Utara telah melancarkan berbagai operasi, baik tertutup maupun terbuka, untuk menyerang Korea Selatan. Serangan skala kecil namun bersifat mematikan (*lethal*) terhadap Korea Selatan telah menjadi karakteristik pendekatan politik luar negeri Korea Utara di kawasan semenjak tahun 1960 (Heo dan Woo, 2008, hlm. 7).

Perang Korea telah melahirkan *Korean Armistice Agreement* dan *Interim Supplementary Agreement of the Armistice Agreement* pada tahun 1953 yang menggariskan kondisi gencatan senjata. Namun demikian, perjanjian tersebut bukan sebuah perdamaian damai dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat untuk bisa menjamin berlangsungnya stabilitas kawasan. Dengan demikian, masih terdapat probabilitas terjadinya serangan langsung antara kedua negara di Semenanjung Korea. Masuknya kekuatan Barat yang lebih memihak otoritas Korea Selatan pasca perjanjian gencatan senjata tersebut secara tidak langsung kembali memanasakan suhu keamanan kawasan. Hingga pada era Perang Dingin, isu Semenanjung Korea menjadi salah satu komoditas utama yang dimainkan oleh dua aktor *superpower* pada masa itu—

Amerika Serikat dan Uni Soviet—dalam memperebutkan hegemoni kekuasaan global.

Pada awal periode Perang Dingin, Korea Utara lebih condong melibatkan dirinya dalam payung pengaruh Uni Soviet, terlebih setelah Amerika Serikat memperkuat bantuan militernya terhadap Korea Selatan semenjak tahun 1957. Korea Utara menerima bantuan keamanan, ekonomi dan energi dari Uni Soviet hingga dibentuknya *Nuclear Scientific Research Center* pada tahun 1959. Periode tersebutlah yang kemudian menjadi embrio perkembangan teknologi nuklir Korea Selatan yang semakin progresif dengan menguatnya keberadaan Amerika Serikat di kawasan, yang dianggap sebagai ancaman besar bagi otoritas Korea Utara.

Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Timur memiliki kapabilitas yang signifikan untuk mengembangkan fungsi aliansinya semenjak tahun 1990. Perkembangan tersebut digambarkan melalui modernisasi dan penyusunan kembali aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan⁴ serta redefinisi aliansi Jepang – AS⁵ pada tahun 1996.

Pada awal tahun 1990an, kemunduran dan disintegrasi Uni Soviet hingga akhir Perang Dingin memberikan pengaruh negatif bagi komposisi perimbangan kekuatan (*balance of power*) di Semenanjung Korea. Korea Utara muncul sebagai pihak yang cenderung dirugikan dengan kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin karena kehilangan pelindung utama dan berujung pada meningkatnya insekuritas Pyongyang. Ancaman keamanan

semakin nyata bagi Korea Utara ketika pada tahun 1996 Rusia membatalkan *Friendship, Cooperation and Mutual Assistance Treaty* dengan Korea Utara—perjanjian ini menjamin ketentuan intervensi militer Rusia untuk membantu Korea Utara dalam kondisi darurat—dan pada tahun 2000, Rusia merumuskan *Good Neighbor, Friendship and Cooperation Treaty*, yang membantu perkembangan hubungan politik dan ekonomi namun tidak mencakup asistensi militer (Heo dan Woo, 2003, hlm. 23).

Sementara itu, hubungan antara Pyongyang dengan Beijing dinilai merenggang. Cina yang terklasifikasikan sebagai *great power* di kawasan mendasarkan hubungannya dengan Korea Utara pada tiga prinsip: “不战、不乱、无核” (tanpa perang, tanpa instabilitas, dan tanpa senjata nuklir), dengan merujuk pada tujuan menjaga stabilitas kawasan (Kim, 2017, hlm. 74). Namun, semenjak uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada tahun 2013, ketiga prinsip tersebut berubah lebih spesifik menjadi: denuklirisasi, perdamaian dan stabilitas, dan keberlanjutan *Six Party Talks*. Beijing semakin tegas dalam menunjukkan bahwa agresivitas Kim Jong Un terhadap pengembangan senjata nuklir telah menjadi akar instabilitas di Semenanjung Korea dan Asia Timur, kondisi yang sangat dihindari oleh sebuah *great power* kawasan. Pada ranah domestik, pemerintah Cina telah mengadopsi Resolusi 2321 tahun 2016 yang menggarisbawahi kesiapan untuk membendung program nuklir Korea Utara dan mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Perubahan sikap Cina tersebut telah menggiring Korea Utara untuk semakin independen dalam menentukan posisinya di kawasan, salah satu upayanya termasuk pengembangan modernisasi teknologi nuklirnya yang akan terus dilakukan Kim Jong Un meskipun tanpa respon positif dari Beijing.

⁴ Sebagaimana terkandung dalam dokumen *Joint Declaration on the Republic of Korea – United States, Alliance and Peace on the Korean Peninsula* yang ditandatangani pada 15 November 2005.

⁵ Fungsi dan cakupan sistem aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat berkembang sejak diratifikasinya *Japan-US Joint Declaration on Security*.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi nuklir Korea Utara yang mengarah pada kepemilikan senjata nuklir, dapat dilihat sebagai efek dari instabilitas kawasan (Bermudez, 2015, hlm. 8). Jadi, analisis mengenai perubahan kebijakan nuklir Korea Utara sudah seharusnya dimulai dengan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada hubungan antar negara di kawasan Asia Timur.

Analisis Variabel *Regional Security Complex* Asia Timur

Perkembangan isu nuklir Korea Utara di bawah rezim Kim Jong Un telah berubah ke arah yang sama sekali berbeda dengan dua rezim sebelumnya, bahkan dipandang sebagai tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya (*unprecedented action*) oleh Kim Jong Un. Jung Pak dan Ryan Hass (2017, hlm. 1) menyatakan bahwa semenjak naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2011, Kim Jong Un cenderung memilih politik isolasi, menolak keterlibatan dalam andil positif terhadap isu-isu kawasan, menunjukkan keengganan untuk bersikap kooperatif terhadap isu senjata nuklir di kawasan, mengupayakan perkembangan kapabilitas militer konvensional, serta meningkatkan probabilitas untuk provokasi dalam konteks *cyberattacks*, serta pengembangan penggunaan senjata kimia dan biologi ke arah yang destruktif (Pak dan Hass, 2017, hlm. 2-5).

Tercatat setidaknya tiga kali uji coba peluncuran senjata nuklir dilakukan oleh Korea Utara di bawah rezim Kim Jong Un, akselerasi yang dengan jelas menunjukan intensitas perkembangan teknologi nuklir di tangan Kim Jong Un yang semakin mengancam rezim *non-proliferasi* internasional. Di bawah rezim Kim Jong Un pulalah terjadi perubahan arah wacana pengembangan nuklir Korea Utara yang sebelumnya mendeskripsikan teknologi nuklir

sebagai alat perlindungan terhadap kekuatan Amerika Serikat di kawasan yang bersifat mengancam, menjadi fokus terhadap penekanan hak Korea Utara untuk memiliki senjata nuklir (Su dan Saalman, 2017, hlm. 5).

Namun demikian, Korea Utara mulai menunjukkan sikap kooperatif terhadap isu denuklirisasi semenjak April 2018, menyusul kemudian adalah pertemuan bersejarahnya dengan pihak Korea Selatan, hingga peledakan pusat pengembangan nuklirnya pada bulan Mei. Tulisan ini menganalisis perubahan sikap Kim Jong Un yang cukup kontras tersebut tidak terlepas dari pengaruh stabilitas keamanan dalam ranah regional, yang termasuk pula didalamnya penetrasi kekuatan eksternal, dalam hal ini Amerika Serikat sebagai entitas berstatus *superpower*. Identifikasi pengaruh kompleksitas isu regional terhadap perilaku Korea Utara dapat dibedah dengan beberapa variabel.

- *Boundary*

Buzan dan Wæver (2003, hlm. 46) mengemukakan pentingnya jarak geografis dalam mendefinisikan distribusi kekuatan di kawasan. Jarak merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam keamanan kawasan, hal ini dikarenakan banyaknya jenis ancaman yang akan lebih mudah masuk antara negara yang jaraknya berdekatan. Kedekatan geografis, menurut Buzan, memiliki dampak yang paling kuat dalam interaksi geografis, juga sangat menentukan arah kebijakan militer, politik, lingkungan dan tatanan sosial suatu negara, meskipun kedekatan geografis cenderung memberikan pengaruh yang lebih lemah terhadap sektor ekonomi negara (Buzan dan Wæver, 2003, hlm. 47).

Pemetaan geografis Asia Timur menempatkan Korea Utara di sisi selatan Cina, sementara batas selatan Korea Utara

tepat berhadapan dengan Korea Selatan. Sementara itu, komposisi geografis kawasan Asia Timur ditentukan juga oleh letak Jepang yang hanya terpisah oleh Selat Korea dengan rival terbesar Korea Utara di kawasan, Korea Selatan. Hubungan Jepang dan Cina yang tidak pernah harmonis turut mendorong negeri matahari terbit untuk mendekatkan pengaruhnya kepada Korea Selatan, diperkuat juga dengan penempatan pangkalan militer AS di Jepang semenjak akhir Perang Dunia II. Latihan militer gabungan yang diselenggarakan rutin oleh tiga negara-US, Jepang, Korea Selatan—dipandang sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan maupun pertumbuhan ekonomi Korea Utara.

Dalam ranah geografis, isu pengembangan nuklir Korea Utara meningkatkan tensi keamanan paling tinggi dalam sub-kawasan Asia Timur, secara spesifik dalam posisi ekuilibrium Pyongyang dan Seoul di Semenanjung Korea. Secara historis, hubungan bilateral Korea Utara dan Korea Selatan berada di bawah perjanjian gencatan senjata yang negosiasinya dimulai sejak tahun 1951 dan disepakati pada Juli 1953 dengan ditandatanganinya *Korean Armistice Agreement* yang mendasari terbentuknya sebuah zona demiliterisasi.

Namun, pergolakan antara kedua negara di Semenanjung Korea tersebut tidak pernah berada dalam kondisi yang stabil, bahkan isu keamanan Korea Utara-Korea Selatan dapat dikatakan fluktuatif dalam taraf yang mengancam stabilitas keamanan Asia Timur. Instabilitas hubungan bilateral kedua negara Korea tersebut diperburuk oleh intensitas intervensi *regional powers*—Cina dan Jepang—dan Amerika Serikat sebagai *superpower*.

Aliansi Cina dan Korea Utara terbentuk bukan hanya karena dasar ideologis sosialis-komunisme, yang merupakan peninggalan payung pengaruh Uni Soviet selama Perang Dingin, namun juga didukung oleh kedekatan

geografis antara keduanya (Ross, 1999, hlm. 81-118). Sementara itu, secara geografis, Korea Selatan cenderung berada dalam lingkup kooperatif dengan Jepang yang hanya berjarak 200 km dengan bagian selatan Semenanjung Korea (Seoh, 1969, hlm. 13). Selain itu, pengaruh Amerika Serikat terhadap Tokyo dan Seoul, terutama dalam aspek asistensi kekuatan militer, mendorong kedua negara ini berada dalam spektrum yang sama dalam memandang isu kawasan, khususnya isu denuklirisasi Semenanjung Korea.

Penjelasan komposisi geografis tersebut dapat menjelaskan melunaknya sikap agresif Korea Utara dalam pengembangan teknologi nuklirnya. Kerenggangan hubungan Korea Utara dengan tetangga terdekat sekaligus aliansi terbesarnya, Cina, ditambah lagi posisi Amerika Serikat yang semakin dominan bagi kekuatan Korea Selatan semenjak tahun 1953 merupakan salah satu faktor pertimbangan terbesar bagi Kim Jong Un untuk mempertimbangkan kembali kemungkinan untuk memperbaiki hubungannya dengan Seoul. Pertimbangan tersebut semakin menguat ketika Korea Selatan, juga memberikan sinyal bagi terbukanya kembali rekonsiliasi damai antara kedua negara. Pertemuan pada April 2018 menjadi kulminasi yang memberikan momentum bagi Korea Utara untuk menunjukkan sikap kooperatif untuk isu denuklirisasi Semenanjung Korea.

- *Anarchic Structure*

Konstelasi pengaruh kekuatan di kawasan Asia Timur dapat dianalisis melalui variabel selanjutnya, yakni *Anarchic Structure* yang melihat derajat otonom negara-negara dalam suatu kawasan. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan suatu institusi kawasan yang mewadahi hubungan dan kerja sama negara-negara anggotanya dapat menjadi salah satu strategi untuk

mewujudkan *enmity over amity*. Contohnya saja, pada akhir 1980, kehadiran *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara dapat dipandang sebagai salah satu bentuk keberhasilan negara-negara anggotanya dalam menjaga *security complex* Jones dan Smith (2006, hlm. 144-146). Melalui kehadiran ASEAN, Buzan melihat negara-negara di Asia Tenggara berada dalam kondisi yang tetap seimbang dan stabil, terlebih dalam menghadapi dinamika internal meskipun negara-negara di dalamnya berada dalam spektrum keamanan yang fluktuatif. Kehadiran ASEAN di Asia Tenggara merupakan salah satu wadah negosiasi yang memiliki peran yang signifikan melalui struktur yang sistematis. Institusi regional, termasuk ASEAN, pun pada umumnya memiliki prinsip-prinsip bersama yang disusun oleh negara-negara anggotanya sendiri, sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat sebagai representasi komitmen masing-masing untuk bersikap kooperatif dalam *problem solving situation* (Buzan, 1988, hlm. 1-16).

Ketidakhadiran institusi regional di Asia Timur pada akhirnya memperlambat interaksi kooperatif antara negara-negara di dalamnya. Walaupun negara-negara di Asia Timur terikat dalam interdependensi satu sama lain—baik dalam ranah ekonomi, politik maupun ekologi—tidak adanya wadah untuk menampung kepentingan kolektif membuat kompetisi regional tidak terarah dan tidak mengacu pada konsep *positive interdependence*. Kecurigaan akan lebih rentan tumbuh antara satu sama lain, membuat negara-negara di Asia Timur cenderung membangun kekuatannya untuk saling mendominasi, dibanding mendukung satu dengan lainnya. Hal ini mempengaruhi kerentanan isu kawasan, khususnya isu denuklirisasi Semenanjung Korea, terhadap intervensi Amerika Serikat sebagai *superpower* yang memihak Korea Selatan.

Keberpihakan entitas eksternal tersebut akhirnya mendorong Korea Utara untuk terus mengembangkan kekuatannya salah satunya melalui pengembangan nuklir dan uji coba rudal balistik.

Namun demikian, ketiadaan institusi regional di Asia Timur tidak berarti absennya itikad baik negara-negara di dalamnya untuk menginisiasi upaya resolusi konflik. Dalam hal ini, *regional power* memiliki peran yang signifikan untuk memulai diskusi dua arah antara entitas-entitas kawasan yang berkonflik. Dalam konteks denuklirisasi Semenanjung Korea, Cina berperan aktif sebagai mediator melalui beberapa *multilateral talks* semenjak tahun 2003. Langkah awal Cina dalam negosiasi damai adalah melalui *Three-Party Talks* antara Korea Utara, AS dan Beijing sebagai mediator. Pihak Korea Utara pada akhirnya setuju untuk menghadiri dialog tiga pihak ini, walaupun posisi dasarnya tidak berubah: Pyongyang meyakini bahwa kesepakatan hanya dapat dicapai melalui perundingan langsung dengan AS karena bagi Korea Utara meyakini kompleksitas isu nuklir Semenanjung Korea merupakan respon terhadap ancaman AS kepada Korea Utara, oleh karena itu kesepakatan langsung harus dicapai hanya oleh kedua negara.

Pembicaraan trilateral tersebut berlangsung sejak April 2003 hingga Oktober 2007 yang kemudian berkembang menjadi Six Party Talks dengan kehadiran perwakilan dari Korea Selatan, Jepang dan Rusia dalam meja perundingan. Six Party Talks melahirkan dokumen-dokumen kesepakatan, namun tidak ada satu pun yang berhasil diimplementasikan. Hambatan yang paling dominan muncul dari sulitnya menemukan titik tengah antara tuntutan AS dan Korea Utara. Di satu sisi, Pyongyang hanya akan setuju untuk memulai proses denuklirisasi jika AS menghentikan kerjasama militernya dengan Korea Selatan. Di sisi lain, AS meyakini bahwa Korea Utara

merupakan pihak yang harus menunjukkan niat baik dalam menjaga stabilitas kawasan dengan terlebih dahulu melakukan denuklirisasi tanpa Washington perlu menarik basis militernya dari Seoul (Park, 2017, hlm. 4).

- *Polarity*

Variabel selanjutnya yang berpengaruh pada konstelasi keamanan dan politik kawasan akan dianalisis melalui variabel ketiga yaitu *Polarity* atau distribusi kekuatan. Distribusi kekuatan dalam *Regional Security Complex* berbasis pada logika anarki yang membuat negara-negara harus berhadapan dengan *security competition*. Distribusi kekuatan juga dipengaruhi oleh mekanisme penetrasi. Penetrasi terjadi ketika kekuatan luar melakukan aliansi keamanan dengan negara-negara dalam RSC.

Secara historis, komposisi *power* di Asia Timur tidak terlepas dari hubungan Cina-Jepang sebagai *regional power*, serta peran Amerika Serikat di kawasan sebagai *superpower*, ketiga kekuatan ini sangat mempengaruhi turbulensi terhadap stabilitas keamanan di Semenanjung Korea, khususnya terkait isu denuklirisasi. Setelah berakhirnya Perang Dingin, hubungan antara dua kekuatan besar kawasan—Cina dan Jepang—cenderung tumbuh positif melalui kerjasama ekonomi dan akomodasi politik. Pada 2013, hubungan dagang bilateral kedua negara tercatat sebagai kerjasama dagang dengan nilai terbesar ketiga di dunia, mencapai US\$340 miliar. Cina merupakan partner dagang utama Jepang di kawasan, mempengaruhi 20% dari keseluruhan skema dagang Jepang. Sementara itu, Jepang merupakan investor utama bagi Cina dengan nilai investasi yang mencapai US\$100 miliar pada tahun 2014. Dengan kata lain, kedua pemain utama di kawasan tersebut saling

membutuhkan satu sama lain, terlebih dalam konteks ekonomi (CEBRI, 2017).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Cina dan stagnansi Jepang mengarahkan hubungan kedua negara pada pola hubungan baru. Sebagai kekuatan yang sedang bertumbuh pesat, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina makin meningkatkan kekuatan militernya dan mengupayakan mobilisasi *hard power* yang lebih aktif terhadap negara-negara tetangga di kawasan. Di sisi lain, Jepang pun menunjukkan pergeseran kebijakan pertahanan di kawasan melalui strategi legislatif yang semakin memprioritaskan kekuatan militernya, atau *Self-Defense Force* (SDF). Perubahan mandat SDF Jepang tersebut juga berarti semakin menguatnya aliansi pertahanan Jepang dengan Amerika Serikat. Kebijakan pertahanan Jepang tersebut praktis mengirimkan sinyal bagi Cina untuk semakin aktif dan waspada dalam memainkan peran sebagai aktor sentral di kawasan. Skenario bipolaritas kawasan antara Cina dan Jepang menjelaskan komposisi distribusi kekuatan yang berperan dalam konflik Semenanjung Korea. Terlebih lagi aliansi Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan otomatis membuat Cina semakin reaktif untuk melindungi aliansinya di kawasan, Korea Utara.

Dalam logika keamanan, kondisi persaingan *balance of power* antara *great power* di kawasan merupakan arena yang memudahkan penetrasi kekuatan eksternal untuk menyebarkan pengaruhnya dalam isu-isu kawasan tertentu. Salah satu syarat berlakunya RSC dalam isu kawasan adalah pola aliansi yang diakibatkan oleh rivalitas kekuatan regional dalam sistem anarki yang membuka peluang bagi penetrasi eksternal. Penetrasi eksternal inilah yang nantinya akan menentukan arah kebijakan *small powers* atau entitas yang berada dalam suatu lingkup regional. Kondisi tersebut berlaku dalam isu denuklirisasi Semenanjung Korea.

Kemunculan Amerika Serikat dalam komposisi *multilateral talks* terkait denuklirisasi sangat mempengaruhi logika keamanan negara-negara di kawasan. (Buzan dan Wæver, 2003, hlm. 50)

Meski demikian, situasi *balance of power* tidaklah ideal bagi negara-negara yang saling membutuhkan dari segi ekonomi. Stabilitas kawasan merupakan kondisi yang lebih ideal karena menjamin pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan Asia Timur cenderung memandang kebijakan pengembangan nuklir Korea Utara berpotensi memperburuk ketegangan kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, hingga November 2017, Washington di bawah administrasi Donald Trump semakin intens mengimplementasikan tekanan terhadap Kim Jong Un. Selain tekanan dari Amerika Serikat, Cina yang merupakan *great power* sekaligus *regional power* yang juga semakin condong mendukung terciptanya denuklirisasi Semenanjung Korea.

- *Social Construction*

Variabel keempat yaitu *Social Construction*, menjelaskan pola *amity* (kawan) dan *enmity* (lawan) di kawasan, bagaimana pola ini terbentuk, bertahan, dan berubah. Melalui variabel ini dilihat bagaimana dinamika perimbangan kekuatan menciptakan *security dilemma* dan *mutual distrust* yang mendorong pola *enmity* dan *amity*.

Pola *amity-enmity* mencakup latar belakang sejarah dan sosial di kawasan tersebut. Dengan memandang bagaimana tiap-tiap entitas dalam sebuah kawasan memandang satu dengan yang lain, pola *amity-enmity* dapat dikategorisasikan ke dalam empat tipe sebagai berikut: Pola *amity* dan *enmity* dapat berbentuk *chaos* (dimana hampir semua hubungan jenisnya adalah *enmity*), formasi konflik regional (didominasi oleh hubungan yang konfliktual namun

amity masih dimungkinkan), *security regime* (didominasi hubungan kerjasama tapi *enmity* masih tetap ada), dan *security communities* (hampir semua hubungan merupakan hubungan *amity*). Pola hubungan ini sifatnya bertahan lama, dan walaupun mungkin berubah meskipun perubahan tersebut bersifat perlahan.

Menilik pada sistem anarki dan struktur bipolar yang mempengaruhi pola aliansi dan intervensi *superpower* di Asia Timur, konstruksi sosial kawasan tersebut cenderung bersifat konfliktual. Namun demikian, pola *amity* masih dapat diupayakan terbukti dari keberadaan instrumen-instrumen diplomasi seperti *Six-Party Talks*. Argumen ini berangkat dari premis dasar bahwa struktur keamanan Asia Timur hingga hari ini masih ditentukan oleh hubungan antara dua kekuatan besar yang sangat berpengaruh di kawasan, Cina dan Amerika Serikat (beserta aliansi masing-masing).

Dalam konteks Asia Timur, kompetisi kekuatan-kekuatan besar tersebut saling tumpang tindih dalam interdependensi politik, ekonomi dan militer yang cenderung kompleks. Walaupun Xi Jinping telah mengemukakan “kebangkitan kembali” kejayaan Cina dengan mengedepankan “*a new model of great power relations*”, Beijing tidak pernah secara gamblang mengemukakan “*core interest*” politik luar negerinya yang cenderung menghindari konflik langsung dengan AS, serta keinginan Cina untuk membangun hubungan yang lebih kooperatif dengan Washington (Cronin dkk., 2013). Kurangnya transparansi terkait strategi perumusan politik luar negeri Cina ini menimbulkan kekhawatiran bagi *middle powers*—Korea Selatan & Korea Utara—di kawasan, khususnya terkait modernisasi militer yang terus dikembangkan Cina.

Penjelasan di atas mendasari sifat Cina yang cenderung condong terhadap negosiasi damai dalam isu denuklirisasi Semenanjung

Korea. Cina percaya sikap ini merupakan pilihan *Pareto Optimal*—strategi distribusi kekuatan dimana kondisi suatu pihak tidak dapat diperbaiki tanpa membuat kondisi pihak lain menjadi lebih buruk. Walaupun strategi negosiasi damai yang diusahakan Cina tidak dapat memuaskan semua pihak, namun setidaknya akan memberikan sedikit keuntungan bagi banyak pihak dengan upaya minimal. Kondisi tersebut menunjukkan intensitas Cina dalam mengupayakan tetap terwujudnya pola *amity* di tengah permusuhan historis antara negara-negara kawasan. Pola *enmity* yang dapat dikatakan dominan dalam konstelasi keamanan Asia Timur tidak hanya tergambar dari instabilitas isu Semenanjung Korea, namun juga melalui sejarah kelim hubungan Cina dan Jepang, maupun kontestasi pengaruh dalam skala global antara Cina dan Amerika Serikat.

Dalam RSC, pola *amity* dan *emity* merupakan refleksi dari distribusi kekuatan yang berperan aktif dalam isu kawasan. Tentu saja, peran aktif Cina sebagai *regional power* sangat menentukan arah penyelesaian konflik denuklirisasi Korea Utara yang merupakan aliansinya semenjak Perang Dingin berakhir. Upaya Cina dalam merealisasikan denuklirisasi secara damai melalui berbagai perundingan *multilateral*, secara tidak langsung telah memberikan batasan bagi Korea Utara untuk meredefinisikan kepentingan keamanannya agar lebih beresonansi dengan cita-cita stabilitas keamanan regional yang sangat gencar dikumandangkan Cina dan Amerika Serikat. Pada akhirnya, situasi *enmity* antara kedua negara di Semenanjung Korea, meskipun tidak sepenuhnya hilang, dapat dikendalikan oleh upaya *regional powers* dalam menciptakan kondisi kooperatif.

Dalam RSC, posisi Cina sebagai *regional power* sekaligus *great power* dalam konteks global memainkan peran penting untuk memediasi kepentingan *superpower* di

kawasan dalam berinteraksi dengan Korea Utara yang menjadi unit sentral dalam isu denuklirisasi. Semenjak tahun 2003, Cina hadir menjadi mediator yang cukup berhasil membendung probabilitas tekanan destruktif Amerika Serikat terhadap Korea Utara, sekaligus menahan agresivitas Korea Utara. Sikap Cina yang semakin menunjukkan ketegasannya kepada Kim Jong Un melalui persetujuan atas penerapan berbagai bentuk sanksi kepada Pyongyang pun dapat dipandang sebagai upayanya dalam membentuk pola *amity* yang semakin kental di Semenanjung Korea.

KESIMPULAN

Dengan memandang pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah *regional security complex*, Asia Timur merupakan kawasan yang sarat dengan ancaman. Partisipasi *superpower* Amerika Serikat di kawasan tersebut, khususnya aliansinya dengan Korea Selatan dan Jepang, merupakan ancaman terbesar bagi kepentingan-kepentingan nasional Korea Utara. Terlebih lagi, Cina sebagai salah satu sekutu terbesar Korea Utara justru mengambil sikap tegas terkait isu denuklirisasi.

Pergantian kepemimpinan Amerika Serikat pada bulan Januari 2017 dari Presiden Barack Obama kepada Presiden Donald Trump pada awalnya memperkuat intensitas tekanan terhadap Korea Utara. Trump yang lekat dengan karakteristik berapi-apinya, terkadang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang bersahabat terkait Korea Utara (BBC News, 2017b; Griffiths, 2017; Borak, 2017). Salah satu puncak dari pernyataan tersebut adalah serangan personal Trump yang menyebut Kim sebagai "*little rocket man*" (Associated Press, 2017).

Meski demikian, sejak awal tahun 2018, pernyataan-pernyataan Trump mengenai Korea Utara, khususnya Kim, berubah

drastis. Pada bulan Januari 2018, Trump mengeluarkan pernyataan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kim dan berkenan untuk berbicara langsung dalam konteks diplomasi bilateral (Beckwith, 2018; Bender, dkk., 2018). Pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat tidak terduga. Pasalnya, sejak Korea Utara menjadi sebuah negara di akhir Perang Korea, belum pernah ada Presiden Amerika Serikat yang bertemu langsung dengan Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Friedman, 2018).

Pendekatan Trump disambut baik oleh Korea Utara (Landler, 2018). Nyatanya, Korea Utara berkepentingan untuk bertemu dengan Amerika Serikat dalam sebuah pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral antara keduanya dipandang oleh Korea Utara sebagai sebuah legitimasi dari komunitas internasional atas kekuatan Korea Utara yang patut dipertimbangkan dalam konteks politik internasional. Melunaknya sikap Trump mengubah persepsi Korea Utara mengenai Amerika Serikat, dari kutub *enmity* menjadi sedikit bergeser ke arah *amity*.

Pergeseran serupa juga terjadi dalam hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sebagai bagian dari persiapan pertemuan dengan Amerika Serikat, Korea Utara mengadakan pertemuan bilateral dengan Korea Selatan untuk memulai pembicaraan mengakhiri Perang Korea. Wacana perdamaian di Semenanjung Korea dikembangkan, termasuk salah satunya kemungkinan reunifikasi Korea (Aleem, 2018).

Jika ditinjau dengan lensa analisis RSCT, secara kumulatif telah terjadi perubahan persepsi Korea Utara terhadap kawasan Asia Timur. Sebelumnya, Korea Utara memandang kawasan tersebut penuh dengan ancaman, khususnya dari Amerika Serikat. Perkembangan yang terjadi di awal tahun 2018 telah mengubah pandangan

tersebut, yaitu dengan menggeser konstruksi Korea Utara terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, terutama Korea Selatan, ke arah kutub *amity*. Akibatnya, secara keseluruhan, terjadi transformasi internal di kawasan Asia Timur.

Korea Utara memandang transformasi tersebut sebagai hal yang positif, karena mendapatkan akses langsung untuk bertemu dengan *superpower* Amerika Serikat. Perubahan persepsi Korea Utara terhadap konstruksi sosial kawasan tersebut pada akhirnya membuat Kim Jong Un memutuskan untuk bersikap kooperatif dalam pengembangan senjata nuklirnya, dibanding terus mengupayakan sikap *enmity* yang akan semakin merugikan posisi tawarnya di kawasan. Puncaknya, pada saat pra-pertemuan dengan Amerika Serikat, yaitu pertemuan Kim-Moon di DMZ Panmunjom, kedua belah pihak menyetujui Deklarasi Panmunjom yang salah satunya berisi komitmen Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Akhadi, Mukhlis. (1997). *Pengantar Teknologi Nuklir*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bermudez, Joseph S., Jr. (1999). A History of Ballistic Missile Development in the DPRK. *Occasional Paper*, No. 2 (Center for Nonproliferation Studies, 1999).
- Bermudez, Joseph S., Jr. (2015). *North Korea's Nuclear Future Series: North Korea's Development of a Nuclear Weapon Strategy*. Baltimore: US-Korea Institute at SAIS.
- Bryman, Alan. (2004). *Social Research Methods: Second Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Buzan, Barry. (1988). The Southeast Asian Security Complex. *Contemporary*

- Southeast Asia*, Vol. 10, No. 1 (June 1988).
- Buzan, Barry dan Ole Wæver. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CEBRI. *Japan's Trade Strategy in the 21st Century and Economic Partnership with Latin American Countries*. Rio de Janeiro: CEBRI.
- Cronin, Patrick M., dkk. (2013). *The Emerging Asia Power Web: The Rise of Bilateral Intra-Asian Security Ties*. Washington: Center for a New American Security.
- Hagstorm, Linus dan Maria Soderberg. (2006). *North Korea Policy, Japan and Great Powers*. New York: Routledge.
- Hecker, Siegfried S. (2006). Report on North Korean Nuclear Program. *Center for International Security and Cooperation Stanford University*. <https://cisac.fsi.stanford.edu/sites/default/files/DPRK-report-Hecker-06-1.pdf>. Diakses 2 Mei 2018.
- Hecker, Siegfried S. (2008). Denuclearizing North Korea. *Bulletin of the Atomic Scientists*, May/June 2008. https://thebulletin.org/sites/default/files_legacy_files/064002011_0.pdf. Diakses 2 Mei 2018.
- Heo, Uk dan Woo Jung-Yeop. (2008). The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress, and Prospects. *Korea Observer*, Vol. 39, No. 4.
- Jones, David Martin dan M. L. R. Smith. (2006). A Delusion Transformed: ASEAN and East Asian Regionalism. Dalam *ASEAN and East Asian International Relations: Regional Delusion*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Kim, Inhan. (2017). Agency Conflict and the End of Strategic Patience. *The Journal of East Asian Affairs*, Vol. 31, No. 2 (Fall/Winter 2017).
- Lee, Chung Min. (2001). North Korean Missiles: Strategic Implications and Policy Responses. *The Pacific Review*, Vol. 14, No. 1.
- Neuman, W. Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches [Fifth Edition]*. Boston: Allyn and Bacon.
- Office of the Director of National Intelligence. (2006). *Statement by the Office of the Director of National Intelligence on the North Korea Nuclear Test* [siaran pers]. <https://fas.org/nuke/guide/dprk/odni101606.pdf>. Diakses 28 Mei 2018.
- Pak, Jung H. dan Ryan L. Hass. (2017). Beyond Maximum Pressure: A Pathway to North Korean Denuclearization. *Foreign Policy at Brookings* [policy brief].
- Park, Jong Chul. (2017). The Prospects for US-DPRK Relations and US-ROK Coordination on the North Korean Policy. *The Journal of East Asian Affairs*, Vol. 31, No. 2 (Fall/Winter 2017).
- Perry, William J. (2006). Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises. *Analysis of the American Academy of Political Science*, Vol. 607. New York: Sage Publication.
- Reuters. (2018). Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula. *Reuters World News*. <https://uk.reuters.com/article/uk-northkorea-southkorea-summit-statement/panmunjom-declaration-for-peace-prosperity-and-unification-of-the-korean-peninsula-idUKKBN1HY193>. Diakses 2 Mei 2018.
- Ross, Robert S. (1999). The Geography of the Peace: East Asia in the Twenty-First Century. *International Security*, Vol. 23, No. 4 (Spring, 1999).

- Seoh, M. S. (1969). A Brief Documentary Survey of Japanese Pirate Activities in Korea in 13th-15th Centuries. *Journal of Korean Studies*, Vol. 1, No. 1.
- Su, Fei dan Lora Saalman. (2017). *China's Engagement of North Korea: Challenges and Opportunities for Europe*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.
- United Nations. (1996). *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/09/19970910%2007-37%20AM/Ch_XXVI_04p.pdf. Diakses 2 Mei 2018.
- United Nations. (1963). *Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water*. <https://www.jstor.org/stable/2196392>. Diakses 2 Mei 2018.
- Internet**
- Aleem, Zeeshan. (2018). North and South Korea Marched Together under One Flag at the Olympics. *Vox*. <https://www.vox.com/world/2018/1/17/16900972/winter-olympics-opening-ceremony-north-south-korea-flag>. Diakses 3 Mei 2018.
- Associated Press. (2017). Trump Calls Kim Jong Un 'Little Rocket Man' on Twitter. *Los Angeles Times*. <http://www.latimes.com/politics/la-pol-updates-everything-president-trump-calls-kim-jong-un-little-rocket-1512093131-htmlstory.html>. Diakses 3 Mei 2018.
- BBC News. (2017). North Korea Nuclear Tests: What Did They Achieve? <http://www.bbc.com/news/world-asia-17823706>. Diakses 2 Mei 2018.
- BBC News. (2018). Trump – Kim Jong-Un Summit Set for Singapore on 12 Jun. *BBC News Asia*. <http://www.bbc.com/news/world-asia-44074257>. Diakses 2 Mei 2018.
- _____. (2017a). Apa yang Kita Ketahui tentang Program Rudal dan Nuklir Korea Utara. *BBC News Indonesia*. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41079482>. Diakses 2 Mei 2018.
- _____. (2017b). Trump and North Korea War of Words Escalates. *BBC News Asia*. <http://www.bbc.com/news/world-asia-41377124>. Diakses 3 Mei 2018.
- Beckwith, Ryan Teague. (2018). President Trump Says He Has a 'Very Good Relationship' with Kim Jong-Un. *Time*. <http://time.com/5100039/donald-trump-kim-jong-un-good-relationship/>. Diakses 3 Mei 2018.
- Bender, Michael C., Louise Radnofsky, Peter Nicholas dan Rebecca Ballhaus. (2018). Donald Trump Signals Openness to North Korea Diplomacy in Interview. *The Wall Street Journal*. <https://www.wsj.com/articles/donald-trump-signals-openness-to-north-korea-diplomacy-in-interview-1515705497>. Diakses 3 Mei 2018.
- Borak, Donna. (2017). Trump Warns 'Major' North Korea Sanctions Coming Soon. *CNN Money*. <http://money.cnn.com/2017/11/29/news/economy/north-korea-sanctions/index.html?iid=EL>. Diakses 3 Mei 2018.
- Cha, Victor dan Lisa Collins. (2018). Preparation before Scheduled Dismantlement of Nuclear Test Site. *Beyond Parallel*. <https://beyondparallel.csis.org/postponement-punggye-ri-minimal-changes-scheduled-dismantlement-nuclear-test-site/>. Diakses 2 Mei 2018.
- Choe, Sang-Hun. (2018). North Korea's Big Moment is Upended by Trump. *The New York Times*

- <https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/asia/north-korea-shuts-nuclear-test-site.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news>. Diakses 2 Mei 2018.
- CNN. (2018). North Korea Nuclear Timeline Fast Facts. *CNN Library*. <https://edition.cnn.com/2013/10/29/world/asia/north-korea-nuclear-timeline---fast-facts/index.html>. Diakses 2 Mei 2018.
- Fifield, Anna. (2018). In a Feel-good Korea Summit, Kim Lays the Ground Work for Meeting with Trump. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/north-and-south-korea-agree-to-work-toward-common-goal-of-denuclearization/2018/04/27/7dcb03d6-4981-11e8-8082-105a446d19b8_story.html?noredirect=on&utm_term=.04d9d4738778. Diakses 3 Mei 2018.
- Friedman, Uri. (2018). What's There to Talk about North Korea? *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/03/kim-jong-un-negotiations/555023>. Diakses 3 Mei 2018.
- Griffiths, James. (2017). North Korea Heaps Insults on Trump, Warns He Will 'Pay Dearly'. *CNN World*. <https://edition.cnn.com/2017/11/15/asia/north-korea-trump/index.html>. Diakses 3 Mei 2018.
- Landler, Mark. (2018). North Korea Asks for Direct Nuclear Talks, and Trump Agrees. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2018/03/08/us/politics/north-korea-kim-jong-un-trump.html>. Diakses 3 Mei 2018.
- Shin, Hyonhee. (2018). North Korea's Kim to Invite US Experts for Nuclear Site Shutdown as Trump Presses for Full Denuclearization. <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea/north-koreas-kim-to-invite-u-s-experts-for-nuclear-site-shutdown-as-trump-presses-for-full-denuclearization-idUSKBN1HZ04K>. Diakses 3 Mei 2018.
- Warrick, Joby, Ellen Nakashima dan Anna Fifield. (2017). North Korea Now Making Missile-Ready Nuclear Weapons, US Analysts Say. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/north-korea-now-making-missile-ready-nuclear-weapons-us-analysts-say/2017/08/08/e14b882a-7b6b-11e7-9d08-b79f191668ed_story.html?utm_term=.9ac338c13a51. Diakses 3 Mei 2018.